

Penguatan Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir Melalui Pendampingan Partisipatif

Mursidah ¹, Uliyatul Mu'awwanah^{2*}

¹Universitas Dr. H. Sumarno Banyuwangi, ²Universitas Al Falah As Sunniyyah Jember

*Corresponding Author: uliyatul11@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat dan UMKM di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi melalui penguatan tata kelola organisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Program dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir dan pengembangan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pemetaan masalah, pelatihan, praktik pendampingan, penyusunan dokumen kelembagaan, serta evaluasi kegiatan. Kegiatan ini melibatkan 27 peserta yang berasal dari POKLATARI, POKDAKAN, KTH, POKLAHSAR, POKMASWAS, dan mitra program. Pendampingan dilaksanakan selama empat hari dengan materi tata kelola kelembagaan, *Business Model Canvas* (BMC), pengelolaan keuangan kelompok, pelaporan keuangan, audit komunitas, serta penerapan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menerapkan prinsip *good governance*, menyusun model bisnis kelompok, melakukan pencatatan keuangan sederhana, serta menyusun laporan keuangan dan standar operasional prosedur (SOP) pelaporan. Luaran kegiatan berupa piagam tata kelola, *Business Model Canvas*, buku kas kelompok, format laporan keuangan, dan draft SOP pelaporan. Program ini memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi organisasi, serta keberlanjutan pengelolaan usaha kelompok. Pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi hasil program dan memperkuat kemandirian kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi desa dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola Kelembagaan; Akuntabilitas; Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This community service program aimed to strengthen the institutional capacity of community groups and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Wringinputih Village, Muncar District, Banyuwangi Regency through the improvement of organizational governance, transparency, and accountability. The program was conducted to support sustainable coastal resource management and community-based economic development. A participatory empowerment approach was employed through needs assessment, problem mapping, training, mentoring practices, institutional document development, and evaluation. The program involved 27 participants representing environmental conservation groups, fish farmer groups, forest farmer groups, fish processing and marketing groups, community monitoring groups, and partner institutions. The mentoring activities were carried out over four days covering institutional governance, Business Model Canvas (BMC), group financial management, financial reporting, community auditing, and the implementation of Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) principles. The results showed an improvement in participants' knowledge and skills in applying good governance principles, developing business models, maintaining financial records, and preparing financial reports and standard operating procedures (SOPs). The outputs included a governance charter, Business Model Canvas documents, group cash books, financial reporting formats, and draft financial reporting SOPs. The

program contributed positively to institutional strengthening, organizational transparency, and the sustainability of community-based enterprises. Continuous mentoring is recommended to ensure the implementation of program outcomes and to enhance community institutional independence in supporting sustainable economic and environmental development.

Keywords: *Institutional Governance; Accountability; Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, keberhasilan suatu kelompok usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang diterapkan. Tata kelola yang baik (*good governance*) berperan penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas organisasi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan anggota maupun mitra eksternal. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan yang kuat berkontribusi terhadap keberlanjutan organisasi masyarakat dan UMKM karena mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial dan ekonomi (Suyatno & Suryani, 2024; Hadi et al., 2024).

Desa Wringinputih merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi berbasis perikanan, budidaya tambak, pengolahan hasil perikanan, kehutanan sosial, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Potensi tersebut didukung oleh keberadaan berbagai kelompok masyarakat seperti Kelompok Pelestari Lingkungan (POKLATARI), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR), dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kelompok-kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Keberadaan kelembagaan masyarakat yang kuat menjadi modal sosial penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif (Maharani & Asmorowati, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian kelompok masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam tata kelola organisasi. Permasalahan yang ditemukan antara lain belum optimalnya sistem administrasi organisasi, rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan kelompok, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelaporan yang baku, serta terbatasnya mekanisme pengawasan dan pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh anggota kelompok. Selain itu, sebagian besar kelompok masih menggunakan sistem pencatatan keuangan yang sederhana sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan organisasi serta menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan kelembagaan.

Permasalahan tata kelola kelembagaan menjadi isu penting dalam pengembangan organisasi masyarakat dan UMKM. Penelitian Sari dan Widodo (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan tata kelola organisasi berbasis masyarakat. Temuan tersebut diperkuat oleh Riskiyah dan Hermawan (2025) yang menjelaskan bahwa sistem pelaporan yang akuntabel mampu meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Sementara itu, Sari dan Rahmaini (2025) menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengembangan UMKM berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan organisasi dan keberlanjutan usaha. Selain aspek tata kelola, kelompok masyarakat di Desa Wringinputih juga menghadapi tantangan dalam perencanaan usaha yang berkelanjutan. Sebagian besar kelompok telah memiliki aktivitas ekonomi yang berjalan, namun belum memiliki model bisnis yang terdokumentasi secara sistematis. Padahal, model bisnis yang jelas dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi sumber daya utama, aktivitas inti, mitra strategis, segmen pelanggan, serta sumber pendapatan yang mendukung keberlanjutan usaha (Osterwalder & Pigneur, 2010). Penelitian Purwantini et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan yang mengintegrasikan aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan perencanaan bisnis mampu meningkatkan daya saing serta keberlanjutan UMKM. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Yusupa et al. (2024) yang menegaskan bahwa program peningkatan kapasitas kelembagaan memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan kelompok masyarakat dalam mengelola usaha secara lebih profesional.

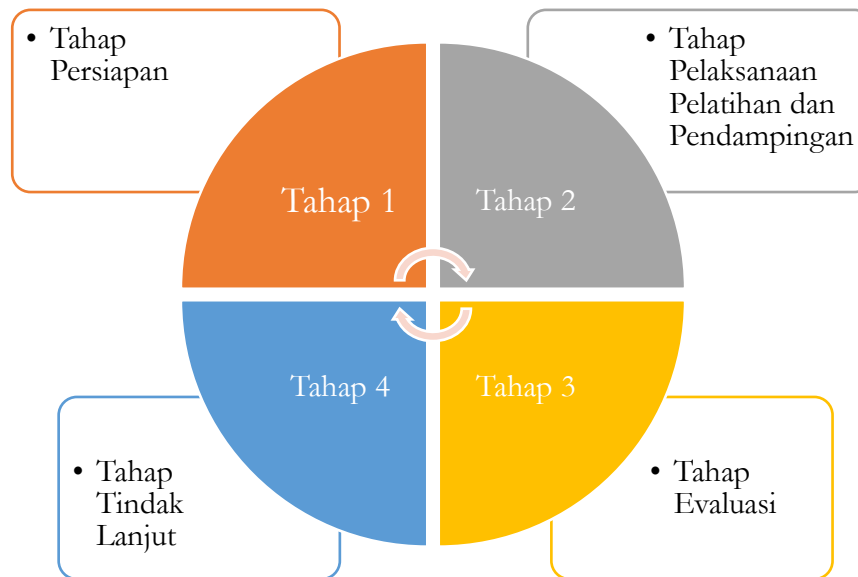
Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi dalam membangun partisipasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang inklusif. Pendekatan partisipatif terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan sehingga memperbesar peluang keberlanjutan kegiatan setelah program berakhir (Ife, 2013). Penelitian Aditya et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan berbasis community development mampu meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat melalui penguatan struktur organisasi, peningkatan partisipasi anggota, dan pengembangan kapasitas usaha. Selain itu, penguatan kapasitas organisasi yang didukung oleh literasi keuangan juga terbukti mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha kelompok dan ketahanan ekonomi masyarakat (Harlina et al., 2025). Berbagai kegiatan pengabdian dan penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada pengembangan usaha, pemasaran digital, atau peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih relatif sedikit program yang mengintegrasikan penguatan tata kelola kelembagaan, pengelolaan keuangan, *Business Model Canvas* (BMC), audit komunitas, dan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam satu model pendampingan yang komprehensif. Penelitian Nugroho et al. (2025) menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan kemampuan organisasi dalam mengelola informasi, komunikasi, serta akuntabilitas internal. Oleh karena itu, diperlukan model pendampingan yang mampu menjawab kebutuhan kelembagaan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan safeguards kelembagaan bagi kelompok masyarakat dan UMKM di Desa Wringinputih,

Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan melalui penguatan tata kelola organisasi dan pengembangan kapasitas masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam kegiatan ini meliputi: (1) bagaimana meningkatkan pemahaman kelompok masyarakat mengenai prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik; (2) bagaimana meningkatkan kemampuan kelompok dalam menyusun model bisnis yang berkelanjutan; (3) bagaimana meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelaporan keuangan kelompok secara transparan dan akuntabel; serta (4) bagaimana mendorong penerapan prinsip inklusivitas dan partisipasi dalam pengelolaan organisasi masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat dan UMKM melalui penguatan tata kelola organisasi, penyusunan *Business Model Canvas* (BMC), pengelolaan keuangan kelompok, penyusunan sistem pelaporan keuangan, audit komunitas, serta penerapan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk kelembagaan masyarakat yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pengembangan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sasaran kegiatan adalah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan usaha ekonomi dan pelestarian lingkungan pesisir, yang terdiri atas Kelompok Pelestari Lingkungan (POKLATARI), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta perwakilan mitra program. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 27 orang yang dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dalam pengelolaan organisasi dan kegiatan ekonomi kelompok. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan *Participatory Community Empowerment* yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu meningkatkan partisipasi peserta dalam proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, hingga implementasi hasil pendampingan. Selain itu, kegiatan juga mengintegrasikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) untuk memastikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang setara dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan kelompok. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, evaluasi, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Tahapan metode pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Sumber: Data Diolah

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan WRI Indonesia, Konservasi Indonesia, Program AQUADAPT, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat peserta kegiatan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan (need assessment), observasi lapangan, wawancara informal dengan pengurus kelompok, serta pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok masih menghadapi kendala pada aspek tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, pelaporan administrasi, serta perencanaan keberlanjutan usaha kelompok.

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Tahap pelaksanaan dilakukan selama empat hari menggunakan metode ceramah interaktif, *Focus Group Discussion* (FGD), simulasi, praktik langsung, studi kasus, role play, workshop, dan presentasi kelompok. Materi pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan peserta yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

a. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Kegiatan hari pertama difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi melalui pemahaman prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan efektivitas organisasi. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja untuk menyusun struktur organisasi, pembagian peran, aturan main organisasi, serta mekanisme pengambilan keputusan. Luaran pada tahap ini berupa piagam tata kelola kelembagaan yang disusun secara partisipatif oleh masing-masing kelompok.

b. Penguatan Model Bisnis Kelompok

Kegiatan hari kedua berfokus pada penyusunan *Business Model Canvas* (BMC) sebagai instrumen perencanaan usaha kelompok. Peserta memperoleh materi mengenai sembilan elemen utama BMC yang meliputi *customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partners,* dan *cost structure*. Selanjutnya peserta melakukan analisis model bisnis kelompok masing-masing serta menyusun roadmap pengembangan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan.

c. Penguatan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan hari ketiga diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan kelompok. Materi yang diberikan meliputi pencatatan transaksi keuangan, penyusunan buku kas, pengelolaan saldo, transparansi keuangan, *cost sharing*, serta pengelolaan dana darurat. Pada tahap ini peserta melakukan praktik langsung penyusunan buku kas kelompok berdasarkan kondisi riil organisasi yang mereka kelola.

d. Penguatan Sistem Pelaporan dan Audit Komunitas

Kegiatan hari keempat difokuskan pada penyusunan laporan keuangan sederhana, audit komunitas, mekanisme pengaduan, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan keuangan. Peserta menyusun draft SOP pelaporan keuangan yang memuat mekanisme pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan audit internal kelompok sebagai bentuk penguatan sistem akuntabilitas organisasi.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas peserta. Evaluasi dilaksanakan menggunakan pendekatan evaluasi pelatihan yang mencakup observasi partisipasi peserta, diskusi reflektif, penilaian hasil tugas kelompok, serta perbandingan hasil pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi juga dilakukan terhadap kualitas dokumen kelembagaan yang berhasil disusun oleh peserta selama proses pendampingan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:

- a. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai prinsip tata kelola organisasi yang baik.
- b. Tersusunnya piagam tata kelola kelembagaan kelompok.
- c. Tersusunnya *Business Model Canvas* (BMC) dan roadmap usaha kelompok.
- d. Meningkatnya kemampuan peserta dalam menyusun buku kas dan melakukan pencatatan keuangan sederhana.
- e. Tersusunnya format laporan keuangan kelompok dan SOP pelaporan keuangan.
- f. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan GEDSI dalam pengelolaan organisasi.

4. Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut dilakukan melalui penyusunan rencana implementasi hasil pelatihan pada masing-masing kelompok masyarakat. Kegiatan ini meliputi penerapan piagam tata kelola, penggunaan buku kas kelompok, implementasi SOP pelaporan keuangan, pengembangan *Business Model Canvas*, serta penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala.

Pendampingan lanjutan juga direkomendasikan untuk memastikan seluruh hasil pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pengelolaan organisasi dan usaha kelompok. Secara ringkas, alur pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Kegiatan PkM

HASIL KEGIATAN DAN PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI KEGIATAN/PROGRAM

1. Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan safeguards kelembagaan telah dilaksanakan di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini melibatkan 27 peserta yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, yaitu Kelompok Pelestari Lingkungan (POKLATARI), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta perwakilan mitra program. Adapun jumlah perwakilan dari masing-masing kelompok bisa dilihat sebagaimana data pada table berikut:

Tabel 1. Data Peserta Pelatihan

No	Nama Peserta	L/P	Nama Kelompok
1	Syahrul Ahmad Yusuf	L	POKLATARI
2	Hendro Supeno	L	POKLATARI
3	Haryati	P	POKLATARI
4	Nur Kholis	L	POKDAKAN
5	Purwanto	L	POKDAKAN
7	Sulistiono	P	KTH
8	Yuli Astuti	P	KTH
9	Mahri	P	POKLATARI
10	Budiono	L	POKLATARI
11	Istirohah	P	POKLAHSAR
12	Feriansah	L	POKLATARI
13	Ilmi Muhammad	P	KTH
14	Hartatik	P	KTH
15	Mujiono	P	KTH
16	Suradi	L	POKLATARI
17	Supriyanto	L	POKLATARI
18	Zaki Afandi	L	POKDAKAN
19	Asmadi	L	POKDAKAN
20	Sunaryo	L	KTH
21	Vanes	L	POKDAKAN
22	Novianti	P	POKLAHSAR
23	Sulastri	P	POKLAHSAR
24	Sareng	L	KTH
25	Roni	L	POKMASWAS
26	Fani Faisol	L	KONSERVASI INDONESIA
27	Arapa Efendi	L	KONSERVASI INDONESIA

Sumber: Undangan Peserta

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama empat hari melalui pendekatan partisipatif yang mengombinasikan metode pelatihan, diskusi kelompok, simulasi, praktik langsung, dan pendampingan penyusunan dokumen kelembagaan. Seluruh rangkaian kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam mengelola organisasi secara transparan, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan. Hari pertama dan kedua pelatihan dilaksanakan di Hotel Santika Banyuwangi, hal ini dimaksudkan supaya kegiatan bisa dilaksanakan secara tenang dan focus pada materi yang akan diberikan. Sedangkan pada hari ketiga dan keempat dilaksanakan di Gudang Tambak Welas Asih

dengan harapan peserta selain bisa focus pada kegiatan juga bisa melihat secara langsung bagaimana kelompok POKDAKAN (dalam hal ini dijadikan sebagai contoh) dalam pengelolaan usaha kelompoknya yang dijalankan selama ini. Selama empat hari peserta akan diberi materi pelatihan serta dilatih secara langsung.

a. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Kegiatan diawali dengan proses identifikasi kebutuhan dan pemetaan permasalahan kelompok yang dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi, dan wawancara dengan pengurus kelompok. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok masih menghadapi kendala pada aspek tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, sistem pelaporan, dan perencanaan usaha kelompok. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun materi dan strategi pendampingan yang meliputi penguatan tata kelola kelembagaan, penyusunan *Business Model Canvas* (BMC), pengelolaan keuangan kelompok, audit komunitas, mekanisme pengaduan, serta penerapan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Adapun dokumentasi identifikasi kebutuhan sebagaimana foto-foto berikut:



Gambar 3. Proses Identifikasi Kebutuhan dan Pemetaan Permasalahan
Sumber: Dokumen Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari peserta. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam diskusi, wawancara serta mereka tidak segan-segan untuk mengutarakan segala permasalahan yang dialami oleh kelompok selama ini. Selanjutnya, peserta diharuskan untuk mengikuti kegiatan selama empat hari. Adapun jadwal kegiatan selama empat hari tersebut dapat dilihat sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pelatihan

Hotel Santika: Hari 1: Governance			
Waktu	Sesi	Metode	Output
08.00 - 09.30	Pembukaan, kontrak belajar, pre/post tes, dan konsep dasar tata kelola	Pleno + Interaktif	Pemahaman dasar konsep governance
09.30 - 09.45	Kudapan	-	-
09.45 - 11.15	Struktur, peran, aturan main dan sistem pengambilan keputusan	FGD + Diskusi	Struktur dan alur keputusan
11.15 - 12.00	Transparansi, akuntabilitas, dan gap analisis	Pleno	Isu prioritas
12.00 - 13.00	ISHOMA	-	-
13.00 - 14.30	Studi kasus konflik + GEDSI (inklusi & partisipasi)	Role play + word caffe	Matriks inklusi
14.30 - 15.00	Workshop prinsip tata kelola dan komitmen	Kelompok + pleno	Piagam tata kelola
15.00 - 15.15	Kudapan	-	-
Tujuan Hari Pertama: Membangun pemahaman dasar tata kelola yang partisipatif, transparan dan inklusi.			

Hotel Santika: Hari 2: Model Bisnis IPAL/Canva			
Waktu	Sesi	Metode	Output
08.00 - 09.30	Pembukaan, pre/post tes, dan model bisnis	Pleno + Interaktif	Pemahaman dasar model bisnis
09.30 - 09.45	Kudapan	-	-
09.45 - 11.15	Model Bisnis Canvas (MBC), 9 Elemen MBC	FGD + Diskusi	Menerapkan 9 elemen dalam bisnis kelompok
11.15 - 12.00	Stakeholder Mapping, pengelolaan IPAL berbasis kelompok masyarakat	Pleno	Isu prioritas
12.00 - 13.00	ISHOMA	-	-
13.00 - 14.30	Rencana keberlanjutan (sustainability plan)	Role play + word caffe	Diagram perencanaan

14.30 – 15.00	Workshop peta jalan usaha kelompok	Kelompok + pleno	Piagam model bisnis kelompok
15.00 – 15.15	Kudapan	-	-
Tujuan Hari Kedua: Membangun pemahaman model bisnis kelompok dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan.			

Gudang Tambak Welas Asih: Hari 3: Penguatan Pengelolaan Keuangan			
Waktu	Sesi	Metode	Output
08.00 - 09.30	Pembukaan, pre/post tes, dan dasar keuangan usaha kelompok	Pleno + Interaktif	Pemahaman dasar keuangan usaha kelompok
09.30 – 09.45	Kudapan	-	-
09.45 – 11.15	Tata cara pembuatan buku kas, debet, kredit dan saldo	FGD + Diskusi	Pembuatan Buku Kas usaha kelompok
11.15 – 12.00	Transparansi, akuntabilitas, dan mudah diakses	Pleno	Isu prioritas keuangan
12.00 – 13.00	ISHOMA	-	-
13.00 – 14.30	GEDSI (inklusi & partisipasi) dalam keuangan	Role play + word cafe	Kolom tabel laporan arus kas keuangan
14.30 – 15.00	Cost sharing, subsidi, resiko dan dana darurat	Kelompok + pleno	Piagam buku kas usaha kelompok
15.00 – 15.15	Kudapan	-	-
Tujuan Hari Pertama: Membangun pemahaman sumber keuangan usaha kelompok dan mampu membuat buku kas yang transparansi, akuntabilitas dan mudah diakses.			

Gudang Tambak Welas Asih: Hari 4: Pelaporan dan Audit Keuangan			
Waktu	Sesi	Metode	Output
08.00 - 09.30	Pembukaan, pre/post tes, pelaporan, dan audit keuangan	Pleno + Interaktif	Pemahaman dasar pelaporan dan audit keuangan
09.30 – 09.45	Kudapan	-	-
09.45 – 11.15	Format laporan keuangan, model pemisahan debet kredit dan saldo.	FGD + Diskusi	Menerapkan model pelaporan keuangan

11.15 – 12.00	Audit komunitas, mekanisme dan pengaduan	Pleno	Isu prioritas laporan keuangan kelompok
12.00 – 13.00	ISHOMA	-	-
13.00 – 14.30	SOP Pelaporan keuangan kelompok	Role play + word caffe	Diagram pelaporan dan audit
14.30 – 15.00	Workshop pembuatan SOP keuangan kelompok	Kelompok + pleno	Buku laporan keuangan kelompok
15.00 – 15.15	Kudapan	-	-

Tujuan Hari Pertama: Membangun pemahaman laporan dan audit keuangan yang transparan, akuntabel dan mudah diakses oleh semua anggota kelompok.

Sumber: Data Diolah

b. Luaran Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Salah satu capaian utama kegiatan adalah tersusunnya dokumen tata kelola kelembagaan yang memuat struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, mekanisme pengambilan keputusan, serta prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dokumen tersebut disusun secara partisipatif oleh masing-masing kelompok sehingga mencerminkan kebutuhan dan karakteristik organisasi yang mereka miliki. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai dasar dalam pengelolaan organisasi masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi dan membangun kepercayaan antar anggota kelompok.





Gambar 4. Penyusunan Piagam Tata Kelola Kelembagaan
Sumber: Dokumen Kegiatan

c. Luaran Penyusunan *Business Model Canvas* (BMC)

Hasil kegiatan berikutnya adalah tersusunnya *Business Model Canvas* (BMC) bagi masing-masing kelompok masyarakat. Melalui pendampingan ini peserta mampu mengidentifikasi segmen pelanggan, proposisi nilai, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra strategis, struktur biaya, serta sumber pendapatan yang dimiliki kelompok. Penyusunan BMC membantu peserta memahami posisi usaha yang sedang dijalankan sekaligus merumuskan strategi pengembangan usaha yang lebih terarah. Hasil BMC yang disusun juga menjadi dasar bagi kelompok dalam menyusun *roadmap* pengembangan usaha pada masa mendatang.





Gambar 4. Workshop Penyusunan Business Model Canvas
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

d. Luaran Penguatan Pengelolaan Keuangan Kelompok

Pada aspek pengelolaan keuangan, peserta memperoleh pelatihan mengenai pencatatan transaksi, penyusunan buku kas, pengelolaan saldo, dan pelaporan keuangan sederhana. Melalui sesi praktik, peserta mampu menyusun format buku kas kelompok yang dapat digunakan sebagai instrumen pengelolaan keuangan organisasi secara lebih transparan dan sistematis. Selain meningkatkan kemampuan teknis pencatatan keuangan, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya akuntabilitas keuangan dalam menjaga keberlanjutan organisasi dan meningkatkan kepercayaan anggota kelompok.





Gambar 5. Praktik Penyusunan Buku Kas dan Pelaporan Keuangan
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

e. Luaran Sistem Pelaporan dan Audit Komunitas

Pendampingan juga menghasilkan draft *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pelaporan keuangan dan mekanisme audit komunitas yang disusun oleh peserta secara berkelompok. Dokumen tersebut memuat prosedur pencatatan transaksi, pelaporan berkala, pengawasan internal, serta mekanisme pengaduan yang dapat digunakan oleh kelompok dalam meningkatkan transparansi organisasi. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep *safeguards* kelembagaan yang mencakup mekanisme perlindungan anggota, pengelolaan keluhan, pencegahan konflik kepentingan antar kelompok, serta penerapan prinsip inklusivitas dalam pengelolaan organisasi.





Gambar 6. Penyusunan SOP Pelaporan dan Audit Komunitas
Sumber: Dokumen Kegiatan

f. Ringkasan Capaian Program

Secara umum, kegiatan pendampingan berhasil menghasilkan beberapa luaran utama, yaitu: (1) tersusunnya piagam tata kelola kelembagaan kelompok; (2) tersusunnya *Business Model Canvas* (BMC) dan *roadmap* usaha kelompok; (3) tersusunnya buku kas kelompok dan format pencatatan keuangan sederhana; (4) tersusunnya format laporan keuangan kelompok; (5) tersusunnya draft SOP pelaporan keuangan dan mekanisme audit komunitas; serta (6) meningkatnya pemahaman peserta mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, *safeguards*, dan GEDSI dalam pengelolaan organisasi masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat di Desa Wringinputih sebagai modal penting dalam mendukung keberlanjutan usaha dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Desa Wringinputih secara Geografis terletak 45 Km dari pusat kabupaten Banyuwangi. Desa Wringinputih dapat di tempuh dari jalur utara melalui pertigaan Srono ke timur 10 Km, terus dari perempatan tembokrejo kearah selatan 5 KM. Dari pasar Sumberayu ke arah timur 2 KM. Sedang dari arah selatan dapat di tempuh dari arah Kecamatan Tegaldlimo. Desa ini memiliki karakteristik wilayah pesisir dengan potensi ekonomi yang didominasi oleh sektor perikanan, budidaya tambak, pengolahan hasil perikanan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis sumber daya local.



Gambar 3.2 Kantor Desa Wringinputih

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Wringinputih, Muncar, Banyuwangi](https://id.wikipedia.org/wiki/Wringinputih,_Muncar,_Banyuwangi)

2. Pembahasan

a. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan melalui Pendampingan Partisipatif

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi kelompok Masyarakat Desa Wringinputih adalah belum optimalnya tata kelola kelembagaan yang ditandai dengan belum tersedianya pedoman organisasi yang jelas, pembagian tugas yang belum terdokumentasi dengan baik, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas internal kelompok. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas organisasi dalam menjalankan program maupun mengelola usaha kelompok secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan melalui penyusunan piagam tata kelola, penguatan struktur organisasi, serta peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip *good governance*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu menyusun dokumen tata kelola kelembagaan yang memuat struktur organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem koordinasi internal kelompok. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok dan refleksi terhadap kondisi organisasi yang telah berjalan. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan anggota kelompok terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan Keputusan, sehingga menghasilkan kesepakatan yang lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh anggota.

Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Ife (2013) yang menegaskan bahwa keberhasilan program

pemberdayaan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), tetapi juga memperkuat keberlanjutan program setelah proses pendampingan selesai. Dalam konteks kegiatan ini, partisipasi peserta terlihat dari keterlibatan mereka dalam menyusun aturan organisasi, merumuskan mekanisme koordinasi, serta menentukan bentuk pengawasan internal yang sesuai dengan kebutuhan kelompok. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang terjadi pada kelompok masyarakat Desa Wringinputih juga mendukung hasil penelitian Suyatno dan Suryani (2024) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan pembangunan lokal. Organisasi yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Selain itu, penyusunan piagam tata kelola kelembagaan memberikan landasan yang lebih jelas bagi kelompok dalam menjalankan fungsi organisasi. Kejelasan aturan dan pembagian tugas mampu mengurangi potensi konflik internal sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hadi et al. (2024) yang menemukan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan organisasi, partisipasi anggota, dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Aspek lain yang menjadi fokus pendampingan adalah penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi. Selama proses pelatihan, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi, pelaporan kegiatan secara berkala, serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya organisasi kepada seluruh anggota kelompok. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sistem pelaporan dan mekanisme pengawasan sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang sehat dan profesional.

Peningkatan pemahaman tersebut sejalan dengan temuan Sari dan Widodo (2025) yang menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen utama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang efektif. Organisasi yang menerapkan prinsip transparansi memiliki tingkat kepercayaan anggota yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang tidak memiliki mekanisme pelaporan yang jelas. Senada dengan itu, Riskiyah dan Hermawan (2025) menyatakan bahwa sistem akuntabilitas yang baik mampu meningkatkan legitimasi organisasi sekaligus memperkuat hubungan antara pengurus dan anggota kelompok. Dalam perspektif *good governance*, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi (UNDP, 1997). Melalui proses pendampingan, peserta mulai memahami bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kemampuan

organisasi dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Kegiatan pendampingan juga mengintegrasikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) sebagai bagian dari upaya membangun kelembagaan yang inklusif. Peserta didorong untuk memastikan bahwa seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh manfaat dari program yang dijalankan. Pendekatan ini penting karena organisasi yang inklusif cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini kurang terlibat dalam proses pembangunan. Hasil tersebut mendukung penelitian Maharani dan Asmorowati (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip inklusivitas dalam tata kelola kelembagaan masyarakat mampu meningkatkan kualitas partisipasi warga dan memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan program pembangunan berbasis komunitas. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Aditya et al. (2025) yang menyatakan bahwa model pendampingan partisipatif yang memperhatikan aspek inklusivitas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat dibandingkan pendekatan yang bersifat *top-down*.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan tata kelola kelembagaan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas organisasi masyarakat di Desa Wringinputih. Dampak tersebut terlihat dari tersusunnya dokumen tata kelola kelembagaan, meningkatnya pemahaman peserta mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya partisipasi dan inklusivitas dalam pengelolaan organisasi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan kelembagaan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas.

b. Penguatan Model Bisnis Kelompok melalui *Business Model Canvas* (BMC)

Selain permasalahan tata kelola kelembagaan, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok masyarakat di Desa Wringinputih belum memiliki perencanaan usaha yang terdokumentasi secara sistematis. Meskipun kelompok telah menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, seperti budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, pengelolaan kawasan mangrove, dan usaha berbasis sumber daya lokal lainnya, sebagian besar pengelolaan usaha masih dilakukan secara konvensional dan belum didukung oleh perencanaan bisnis yang terstruktur. Kondisi ini menyebabkan kelompok mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi peluang pengembangan usaha, membangun kemitraan strategis, serta menyusun strategi keberlanjutan organisasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pendampingan mengintegrasikan pelatihan dan praktik penyusunan *Business Model Canvas* (BMC) sebagai alat perencanaan bisnis yang sederhana namun komprehensif. BMC digunakan untuk membantu peserta

memahami hubungan antara sembilan elemen utama dalam model bisnis, yaitu *customer segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, dan cost structure* (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Berdasarkan hasil pendampingan, seluruh kelompok peserta berhasil menyusun *Business Model Canvas* sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok, identifikasi potensi usaha, analisis pasar, dan pemetaan sumber daya yang dimiliki. Kegiatan ini membantu peserta memahami posisi usaha yang sedang dijalankan sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan usaha yang sebelumnya belum terpetakan secara jelas. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok sebelumnya hanya berfokus pada aktivitas produksi tanpa memiliki strategi yang jelas terkait segmen pelanggan, nilai tambah produk, maupun pengembangan jaringan kemitraan. Setelah mengikuti pendampingan, peserta mulai mampu mengidentifikasi kelompok pelanggan potensial, merumuskan keunggulan produk yang dimiliki, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih terarah. Kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing usaha kelompok di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Temuan ini sejalan dengan konsep *Business Model Canvas* yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur (2010), yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam merancang model bisnis yang mampu menciptakan, menyampaikan, dan mempertahankan nilai kepada pelanggan. Dengan menggunakan BMC, organisasi dapat melihat hubungan antar-komponen usaha secara menyeluruh sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Peningkatan kapasitas peserta dalam menyusun model bisnis juga mendukung hasil penelitian Purwantini et al. (2025) yang menemukan bahwa pendampingan perencanaan bisnis dan penguatan manajemen usaha mampu meningkatkan keberlanjutan UMKM melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam memahami pasar, mengelola sumber daya, dan mengembangkan strategi bisnis yang adaptif. Dalam konteks Desa Wringinputih, BMC menjadi instrumen yang membantu kelompok masyarakat untuk menerjemahkan potensi sumber daya lokal menjadi peluang ekonomi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Selain membantu perencanaan usaha, penggunaan BMC juga mendorong peserta untuk memahami pentingnya kolaborasi dan kemitraan dalam pengembangan organisasi. Melalui analisis *key partnerships*, peserta mampu mengidentifikasi berbagai pihak yang dapat mendukung pengembangan usaha, seperti pemerintah desa, lembaga pendamping, koperasi, pelaku usaha, perguruan tinggi, maupun organisasi konservasi yang selama ini telah terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir. Kesadaran mengenai pentingnya kemitraan ini menjadi salah satu capaian penting karena sebagian besar kelompok

sebelumnya masih menjalankan usaha secara mandiri dan belum memanfaatkan jaringan kerja sama yang tersedia secara optimal. Hasil tersebut mendukung penelitian Nugroho et al. (2025) yang menjelaskan bahwa penguatan kapasitas organisasi masyarakat perlu diiringi dengan pengembangan jejaring komunikasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Organisasi yang memiliki jaringan kemitraan yang luas cenderung lebih mampu mengakses informasi, sumber daya, teknologi, dan peluang pasar dibandingkan organisasi yang bekerja secara terisolasi. Dari aspek keberlanjutan usaha, penyusunan *Business Model Canvas* juga membantu kelompok dalam mengidentifikasi sumber pendapatan (*revenue streams*) dan struktur biaya (*cost structure*) secara lebih sistematis. Sebelum pendampingan, sebagian besar kelompok belum memiliki gambaran yang jelas mengenai hubungan antara biaya operasional dan sumber pendapatan yang diperoleh. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memetakan sumber penerimaan dan pengeluaran kelompok sehingga dapat menyusun strategi pengelolaan usaha yang lebih efisien. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harlina et al. (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas manajemen usaha berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Pendampingan BMC juga mendorong peserta untuk mengembangkan pola pikir kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*) dalam mengelola organisasi. Kelompok tidak lagi hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi mulai mempertimbangkan aspek nilai tambah, inovasi produk, pengembangan pasar, dan keberlanjutan ekonomi organisasi. Perubahan pola pikir ini menjadi penting karena organisasi masyarakat yang memiliki orientasi kewirausahaan cenderung lebih adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi dan mampu menciptakan peluang baru bagi anggotanya (Simamora & Agusta, 2025).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan *Business Model Canvas* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas perencanaan usaha kelompok masyarakat di Desa Wringinputih. Capaian tersebut ditunjukkan oleh kemampuan peserta dalam menyusun model bisnis secara sistematis, mengidentifikasi peluang pasar, memetakan sumber daya dan mitra strategis, serta merancang strategi keberlanjutan usaha kelompok. Dengan demikian, BMC tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran yang membantu kelompok masyarakat membangun organisasi yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

c. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pelaporan Kelompok

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam keberlanjutan organisasi masyarakat maupun UMKM. Hasil identifikasi awal pada kelompok masyarakat di Desa Wringinputih menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstandar. Pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana, bahkan beberapa kelompok belum memiliki buku kas yang terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut

menyebabkan proses pelaporan keuangan menjadi kurang transparan dan menyulitkan kelompok dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana organisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan pendampingan diarahkan pada peningkatan kapasitas peserta dalam pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan organisasi. Materi yang diberikan meliputi pencatatan transaksi keuangan, penyusunan buku kas, pengelolaan saldo kas, penyusunan laporan keuangan sederhana, audit komunitas, serta penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pelaporan keuangan. Seluruh materi disampaikan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, simulasi, studi kasus, dan praktik langsung menggunakan contoh transaksi yang berasal dari aktivitas kelompok masing-masing.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan organisasi dan mulai menerapkannya dalam bentuk pencatatan transaksi yang lebih sistematis. Setiap kelompok berhasil menyusun format buku kas sederhana yang memuat informasi mengenai tanggal transaksi, uraian kegiatan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Selain itu, peserta juga mampu melakukan klasifikasi transaksi berdasarkan jenis kegiatan sehingga proses monitoring keuangan menjadi lebih mudah dilakukan. Peningkatan kemampuan peserta dalam pencatatan keuangan menunjukkan bahwa proses pendampingan telah memberikan dampak positif terhadap kapasitas administrasi organisasi. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar kelompok hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan tanpa melakukan dokumentasi keuangan secara teratur. Setelah pendampingan, peserta mulai memahami bahwa pencatatan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi dan membangun kepercayaan anggota kelompok. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada para pemangku kepentingan atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan.

Organisasi yang mampu menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan sistematis akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang tidak memiliki sistem pelaporan yang jelas. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa peserta mulai memahami keterkaitan antara transparansi keuangan dan keberlanjutan organisasi. Melalui simulasi dan diskusi kelompok, peserta menyadari bahwa keterbukaan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran organisasi dapat mengurangi potensi konflik internal serta meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok. Temuan ini mendukung penelitian Sari dan Widodo (2025) yang menyatakan bahwa transparansi keuangan merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang efektif dan berkelanjutan.

Selain penyusunan buku kas, pendampingan juga menghasilkan format laporan keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh kelompok untuk

menyampaikan informasi keuangan secara berkala kepada anggota organisasi. Format tersebut memuat ringkasan pemasukan, pengeluaran, saldo akhir, serta keterangan penggunaan dana. Kehadiran format pelaporan yang baku membantu kelompok dalam meningkatkan kualitas administrasi organisasi sekaligus mempermudah proses evaluasi kegiatan. Penyusunan format laporan keuangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Riskiyah dan Hermawan (2025) yang menjelaskan bahwa sistem pelaporan yang terstruktur mampu meningkatkan akuntabilitas organisasi dan memperkuat hubungan antara pengurus dengan anggota kelompok. Organisasi yang memiliki sistem pelaporan yang baik cenderung lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat maupun lembaga mitra karena dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Salah satu luaran penting dari kegiatan pendampingan adalah tersusunnya draft *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pelaporan keuangan kelompok. SOP tersebut memuat mekanisme pencatatan transaksi, jadwal pelaporan, proses verifikasi data, serta mekanisme pengawasan internal organisasi. Kehadiran SOP menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi pengelolaan keuangan sekaligus memastikan bahwa seluruh anggota memahami prosedur yang harus dijalankan dalam pengelolaan dana organisasi. Dalam perspektif *good governance*, keberadaan SOP dan sistem pengawasan internal merupakan bagian dari upaya membangun akuntabilitas organisasi yang berkelanjutan (UNDP, 1997). Organisasi yang memiliki prosedur kerja yang jelas akan lebih mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi, penyalahgunaan dana, maupun konflik kepentingan yang dapat mengganggu keberlangsungan organisasi.

Kegiatan pendampingan juga memperkenalkan konsep audit komunitas sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial dalam pengelolaan organisasi. Audit komunitas dilakukan dengan melibatkan anggota kelompok dalam proses pemeriksaan dan evaluasi penggunaan dana organisasi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan organisasi. Hasil tersebut mendukung penelitian Hadi et al. (2024) yang menjelaskan bahwa keterlibatan anggota dalam mekanisme pengawasan organisasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan memperkuat legitimasi organisasi di mata masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota dalam proses pengawasan, semakin besar pula peluang terciptanya organisasi yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, pendampingan pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas administrasi dan tata kelola organisasi kelompok masyarakat Desa Wringinputih. Keberhasilan program ini ditunjukkan melalui tersusunnya buku kas kelompok, format laporan keuangan, serta SOP pelaporan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan organisasi. Capaian tersebut tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelompok, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung

keberlanjutan usaha kelompok dan kelembagaan masyarakat pesisir serta pelaku UMKM di masa mendatang.

d. Implementasi Safeguards Kelembagaan dan Prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Salah satu aspek yang membedakan kegiatan pendampingan ini dengan program pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah integrasi safeguards kelembagaan dan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam penguatan kapasitas organisasi masyarakat. Pendekatan ini dikembangkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok memiliki akses yang setara terhadap informasi, partisipasi, pengambilan keputusan, serta manfaat program yang dijalankan oleh organisasi. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok masyarakat Desa Wringinputih belum memiliki mekanisme formal yang mengatur sistem pengaduan, penyelesaian konflik internal, perlindungan anggota, maupun prosedur penanganan keluhan organisasi. Selain itu, keterlibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan masih belum terstruktur secara baik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan partisipasi dan mengurangi efektivitas pengelolaan organisasi dalam jangka panjang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pendampingan memberikan penguatan mengenai pentingnya *safeguards* kelembagaan sebagai instrumen perlindungan organisasi dan anggotanya. Materi yang diberikan meliputi mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*), pencegahan konflik kepentingan, perlindungan kelompok rentan, tata cara penyelesaian konflik internal, serta penguatan budaya organisasi yang transparan dan inklusif. Peserta juga didampingi dalam menyusun mekanisme pengaduan yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya keberadaan mekanisme pengaduan sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan anggota dan mencegah munculnya konflik yang berpotensi menghambat kinerja organisasi. Melalui diskusi kelompok, peserta berhasil merumuskan beberapa prosedur sederhana yang dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan, menyelesaikan permasalahan internal, serta memastikan bahwa setiap anggota memperoleh hak yang sama dalam organisasi.

Penerapan *safeguards* kelembagaan tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), khususnya pada aspek partisipasi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas (UNDP, 1997). Organisasi yang memiliki mekanisme perlindungan anggota dan sistem pengaduan yang jelas cenderung lebih mampu menjaga stabilitas organisasi serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan kelompok. Selain *safeguards* kelembagaan, kegiatan pendampingan juga menekankan penerapan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Pendekatan GEDSI bertujuan memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Dalam kegiatan ini, prinsip GEDSI diterapkan melalui pelibatan seluruh peserta secara aktif dalam diskusi, kerja kelompok, penyampaian pendapat, dan presentasi hasil kegiatan. Penerapan prinsip GEDSI menjadi penting karena keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menciptakan ruang partisipasi yang adil dan inklusif bagi seluruh anggota masyarakat. Menurut Aditya et al. (2025), pendekatan pemberdayaan yang berbasis partisipasi dan inklusivitas terbukti mampu meningkatkan keberlanjutan program karena memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Pendekatan ini juga memperkuat rasa memiliki terhadap organisasi sehingga mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam pelaksanaan program.

Selama proses pendampingan, peserta diajak untuk mengidentifikasi potensi hambatan partisipasi yang mungkin dialami oleh kelompok tertentu dalam organisasi. Hasil diskusi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya memberikan ruang yang setara bagi perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kelembagaan yang lebih demokratis dan inklusif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Maharani dan Asmorowati (2024) yang menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan berbasis partisipasi dan inklusivitas mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan masyarakat. Organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman anggotanya cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi, kualitas keputusan yang lebih baik, dan ketahanan organisasi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial maupun ekonomi.

Lebih lanjut, implementasi prinsip GEDSI dalam kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada aspek kesetaraan gender, pengurangan kesenjangan, dan penguatan kelembagaan yang inklusif. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan administrasi dan pengelolaan usaha, tetapi juga pada pembangunan sistem organisasi yang adil, responsif, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi safeguards kelembagaan dan prinsip GEDSI memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas organisasi masyarakat di Desa Wringinputih. Dampak tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman peserta mengenai mekanisme perlindungan anggota, pentingnya sistem pengaduan yang transparan, serta tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya partisipasi yang inklusif dalam pengelolaan organisasi. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kelembagaan masyarakat yang profesional, demokratis, dan berkelanjutan sebagai pendukung utama pembangunan ekonomi dan lingkungan di wilayah pesisir.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan safeguards kelembagaan di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi telah berhasil meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam aspek tata kelola kelembagaan, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta penerapan prinsip inklusivitas organisasi. Melalui pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai tata kelola organisasi yang baik, tetapi juga mampu menyusun berbagai dokumen kelembagaan yang dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berhasil menyusun piagam tata kelola kelembagaan, *Business Model Canvas* (BMC), format buku kas kelompok, sistem pelaporan keuangan sederhana, serta draft Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan dan audit komunitas. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penerapan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam pengelolaan organisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pendampingan telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai fondasi bagi pengembangan usaha kelompok, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih berkelanjutan.

2. Saran/Rekomendasi

Keberlanjutan hasil kegiatan memerlukan komitmen dari seluruh kelompok masyarakat untuk mengimplementasikan dokumen dan sistem yang telah disusun selama proses pendampingan. Oleh karena itu, setiap kelompok diharapkan dapat menerapkan piagam tata kelola kelembagaan, *Business Model Canvas* (BMC), buku kas kelompok, serta SOP pelaporan keuangan secara konsisten dalam kegiatan organisasi sehari-hari. Pemerintah desa dan lembaga pendamping juga perlu melakukan monitoring dan pendampingan lanjutan secara berkala guna memastikan implementasi tata kelola kelembagaan berjalan efektif. Selain itu, diperlukan pengembangan program lanjutan yang berfokus pada digitalisasi administrasi organisasi, penguatan pemasaran produk kelompok, pengembangan jejaring kemitraan usaha, serta peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat agar dampak program dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Sedangkan bagi perguruan tinggi dan lembaga pengabdian masyarakat, kegiatan serupa dapat direplikasi pada kelompok masyarakat lainnya dengan mengintegrasikan aspek tata kelola kelembagaan, pengelolaan keuangan, *safeguards*, dan GEDSI sebagai satu kesatuan model pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Pendekatan tersebut terbukti mampu memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada tingkat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Program AQUADAPT, WRI Indonesia (*World Resources Institute Indonesia*), dan Konservasi Indonesia atas dukungan program, fasilitasi, serta kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir di Desa Wringinputih, Muncar, Banyuwangi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Wringinputih yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, serta kepada seluruh kelompok masyarakat yang menjadi mitra kegiatan, yaitu POKLATARI, POKDAKAN, KTH, POKLAHSAR, dan POKMASWAS yang telah berpartisipasi aktif selama proses pelatihan dan pendampingan berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelaksana, narasumber, fasilitator, dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan, kerja sama, serta kontribusinya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, G., Astutik, D., Annisa, L. H., Shekinah, G. Y., & Kristiyanto, T. J. (2025). Assistance in strengthening women's MSME communities through a community development and community organization approach. *Community Empowerment*, 10(1), 153–161. <https://doi.org/10.31603/ce.12325>
- Hadi, S., Marta, A., Amin, R. M., & Febrina, R. (2024). Rural development in community empowerment through the governance of village-owned enterprises (BUMDes). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(1), 121–134.
- Harlina, P. W., Lembong, E., & Wulandari, E. (2025). Strengthening the competitiveness of MSMEs through financial literacy training. *Community Empowerment*, 10(8), 1743–1751.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Maharani, D. N., & Asmorowati, S. (2024). Community empowerment dalam meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa sebagai desa wisata. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 356–368.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi Publisher.
- Nugroho, C., Wulandari, A., Maulana, D., Rina, N., & Kalaloi, A. F. (2025). Digital communication and literacy for MSME empowerment. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(3), 1–12.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.

- Purwantini, A. H., Khasanah, L., Pravitasari, R., Nugroho, D. A., & Prasetyo, A. B. (2025). Assistance in digital marketing and MSME accounting to support business sustainability. *Community Empowerment*, 10(2), 279–286.
- Riskiyah, S. F., & Hermawan, S. (2025). Village officials and accountable governance of village funds for SDGs 8. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(3).
- Sari, D. N., & Widodo, H. (2025). Financial accountability in village-owned enterprises governance. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(2).
- Sari, T. M., & Rahmaini, P. (2025). The implementation of good governance in regional MSME development. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 11(2), 45–58.
- Simamora, D., & Agusta, B. I. (2025). Reconstruction of MSME empowerment policy from the perspective of people's economy and public governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 31(3), 262–280.
- Suyatno, & Suryani, D. A. (2024). Institutional capacity of MSME based on local potential: A case study in Girikerto, Turi, Sleman. *International Journal of Economic Behavior and Organization*, 12(3), 163–173.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Yusupa, A., Tarigan, V., & Robot, J. R. (2024). Towards competitive UMKM: Capacity building program in North Sulawesi. *Community Empowerment*, 9(8), 1186–1193.